

PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

ABSTRAK

Happy Andi Wisata Bangun *

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menyusun produk hukum daerah di Kota Binjai, tidak lepas dari peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan hukum dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Binjai, bagaimana peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pembentukan produk hukum di Kota Binjai dan hambatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Binjai dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan solusinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep. Pengaturan hukum dalam pembentukan produk hukum daerah Kota Binjai merujuk pada beberapa peraturan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum di Kota Binjai adalah memiliki peran dalam menyusun, membentuk dan menetapkan produk hukum daerah. Hambatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai dalam pembentukan produk hukum di lingkungan pemerintahan Kota Binjai yaitu Kurangnya sumber daya manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai terutama pada Subbag Perundang-Undangan sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak pada turunnya kinerja yang akan datang, disisi lainnya hal tersebut pada akhirnya berdampak pada tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antara Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan dan tugas pokok dan fungsi staf Subbag Perundang-Undangan, belum adanya pelatihan-pelatihan terstruktur, berkesinambungan dan masif bagi Staf Subbag Perundang-Undangan maupun Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan.

Kata Kunci: Peranan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Produk Hukum Daerah

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**THE ROLE OF THE LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT IN
THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS IN
BINJAI CITY GOVERNMENT**

ABSTRACT

Happy Andi Wisata Bangun *

Regional legal products are important instruments in the administration of regional government. To prepare regional legal products in Binjai City, the role of the Legal Section of the Regional Secretariat cannot be separated. The problems discussed are legal regulations in the formation of regional legal products in the City of Binjai, what is the role of the Regional Secretariat Legal Section in the formation of legal products in the City of Binjai and the obstacles to the Legal Section of the Regional Secretariat of the Binjai City Government in the formation of legal products within the Binjai City Government and the solutions. This research is descriptive in nature with a qualitative approach. The types of legal research used are normative juridical and empirical legal research with a statutory approach and a concept analysis approach. Legal regulations in determining regional legal products in the City of Binjai refer to several regulations, including Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products jo. Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018. Binjai Mayor Regulation Number 27 of 2013 concerning Procedures for Forming Regional Legal Products. The role of the Legal Section of the Regional Secretariat in the Formation of Legal Products in Binjai City is to have a role in compiling, forming and establishing regional legal products. Obstacles to the Legal Section of the Binjai City Regional Secretariat in forming legal products within the Binjai City government are the lack of human resources in the Legal Section of the Binjai City Regional Secretariat, especially in the Legislation Subdivision, so it is feared that if it is not resolved immediately it will have an impact on future performance, on the other hand other things, this ultimately has an impact on the overlapping of main tasks and functions between the Functional Position of Legislative Drafter and the main tasks and functions of the Legislative Subdivision staff, there is no structured, continuous and massive training for the Legislative Subdivision Staff and Functional Positions Legislative Drafter.

Key Word : Role, Legal Section of the Binjai City Regional Secretariat, Regional Legal Products

* Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.